

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terciptanya masyarakat yang adil, makmur adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, sebagaimana yang tertera dalam alenia ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terlihat dari berbagai program pembangunan serta perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah. Program pembangunan serta perekonomian yang ditawarkan oleh pemerintah senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, *Covid-19* menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *Covid-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (COVID-19)*. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia

telah melaporkan 2 kasus konfirmasi *Covid-19*, hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi.¹

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada segala aspek kehidupan. Namun demikian, dampak yang cukup dirasakan adalah dampak dalam bidang ekonomi. Mc Kibbin dan Fernando di tahun 2020 menyatakan bahwa seluruh negara yang mengalami pandemi *Covid-19* akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk.² Pemerintah dan masyarakat menjadi antisipasi dan menaruh tingkat kewaspadaan tinggi, karena virus ini memang mengancam nyawa seseorang. Hampir seluruh negara di dunia telah melakukan upaya dalam bentuk kebijakan untuk menanggulangi hal ini, beberapa contoh diantaranya adalah dengan melakukan pembatasan interaksi berskala besar, *lockdown* sektor-sektor bisnis, penerapan protokol kesehatan, dan lain sebagainya.³ Masa pandemi saat ini tentu sangat berdampak besar terhadap ketahanan ekonomi setiap keluarga, terutama untuk keluarga-keluarga menengah kebawah yang hanya mengandalkan atau menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian.

¹Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Kasus *Pandemi Covid-19*. diakses: <https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/lockdown-kegiatan-tetap-jalan-di-dinas-kesehatan-diy-tahun-2020-oleh-seksi-kesehatan-dasar-rujukan-dan-kesehatan-khusus-bidang-dan-pelayanan-kesehatan> Diakses pada 12 Mei 2021 Pukul 09.00 WIB.

²Nurul Aeni. *Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*: Journal Litbang Media Informasi Penelitian, Vol 17, 2021. Diakses pada 10 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

³Hanoatubun, S. *Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia*. EduPsyCouns :Journal of Education, Psychology and Counseling, 2 (1), 146-153. 2020 Diakses pada 12 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB.

Provinsi Jambi termasuk salah satu dari 10 provinsi di Sumatera yang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* yang berkepanjangan sejak Maret 2020 hingga saat ini. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi hingga 1,72 persen.⁴ Penurunan aktivitas ekonomi sejalan dengan menurunnya kinerja hampir seluruh lapangan usaha terlihat dari grafik perkembangan PDRB Provinsi Jambi berikut:

Tabel 1. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi (yoy)



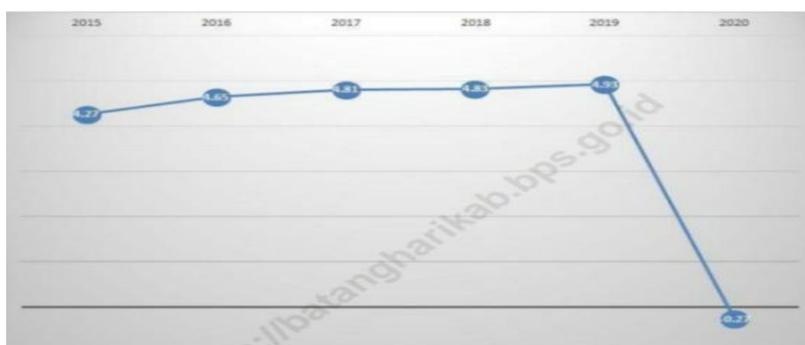
Sumber : BPS Provinsi Jambi

Kemunduran ekonomi tersebut terjadi disebabkan lumpuhnya berbagai kegiatan ekonomi akibat pandemi. Dampak pandemi sangat dirasakan oleh sektor transportasi, penyediaan akomodasi, perdagangan serta jasa-jasa. Dampak pandemi jelas dirasakan masyarakat yang tentu saja hal ini mempengaruhi pendapatan yang menjadi aspek penunjang hidup manusia itu sendiri.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Perkembangan PDRB Provinsi Jambi 2020. Sumber: <https://jambi.bps.go.id/publication/2021/02126/eb5974fa96bbccb4f4dac89c/indonesia-provinsi-jambi-dalam-angka-2021.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB.

Begitu juga yang terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Batang Hari yang mengalami penurunan di berbagai sektor akibat pandemi. Secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Batang Hari tahun 2020 mengalami kontraksi -0,27%.⁵

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari



Sumber: BPS Batang Hari 2021

Melihat keadaan masyarakat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai program yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Prakerja, serta Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dengan terbitnya Peraturan Pusat No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyelesaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, Batang Hari Dalam Angka 2021. Sumber: <https://batangharikab.bps.go.id/publication/2021/02/26/753d2d13d2d13d2f1cqeacd4965c9kabupaten-batang-hari-dalam-angka-2021.html>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB.

dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penangan pandemi *Covid-19*.⁶ Hingga hadirnya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi *Covid-19*. Dengan kriteria penerima calon BLT-DD adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) dengan syarat tidak menerima bantuan lain seperti PKH, BST, Prakerja serta mengalami kehilangan mata pencaharian akibat pandemi atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Untuk mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-DD sesuai aturan yang telah ditetapkan, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-DD selama mengikuti kriteria yang ditetapkan. Beberapa mekanisme pendataan yaitu dimulai dari kepala desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa atau Gugus Tugas *Covid-19*, pendataan, verifikasi/ validasi dan

⁶Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa.

tabulasi, penandatanganan daftar calon, publikasi daftar, pengesahan hingga penyaluran.⁷

Kecamatan Muara Tembesi menjadi salah satu pusat perdagangan di Kabupaten Batang Hari dan mata pencaharian masyarakatnya dominan sebagai petani dan pedagang. Sehingga dampak pandemi sangat dirasakan oleh masyarakat yang mempengaruhi pendapatannya. Dalam hal ini seluruh desa di Kecamatan Muara Tembesi juga menyalurkan anggaran dana desa untuk membantu perekonomian masyarakatnya. Ada 12 desa di Kecamatan Muara Tembesi yang masing-masing menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD di Kecamatan Muara Tembesi tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Anggaran BLT-DD	Jumlah Penerima Manfaat
1	Jebak	Rp 48.300.000	161
2	Ampelu	Rp 40.800.000	136
3	Tanjung Marwo	Rp 18.900.000	63
4	Suka Ramai	Rp 27.600.000	92
5	Rambutan Masam	Rp 17.700.000	59
6	Pulau	Rp 24.000.000	80
7	Sungai Pulai	Rp 27.300.000	91

⁷Rudi, Prawiradinata. *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-DD) 2020*

8	Rantau Kapas Mudo	Rp 17.400.000	58
9	Rantau Kapas Tuo	Rp 30.900.000	103
10	Ampelu Mudo	Rp 15.300.000	51
11	Pelayangan	Rp 34.800.000	116
12	Pematang Lima Suku	Rp 6.000.000	20

Sumber: Kasi Kesra Kecamatan Muara Tembesi

Dari seluruh desa yang menyalurkan BLT-DD di Kecamatan Muara Tembesi, Desa Jebak menjadi desa dengan jumlah penerima BLT terbanyak yaitu 161 penerima manfaat. Selain dengan jumlah penerima terbanyak, dalam daftar pengaduan masyarakat terkait program BLT-DD ini Desa Jebak juga memiliki jumlah pengaduan lebih banyak dari desa yang lain yaitu terdapat 9 orang dengan jenis pengaduan terkait keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan, dan akses jalan yang menjadi kendala dalam penyalurannya. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Pengaduan Masyarakat di Desa Terkait BLT-Dana Desa Sekecamatan Muara Tembesi Tahun 2021

NO	NAMA DESA	JENIS PENGADUAN	JUMLAH
1	Ampelu	Keterlambatan Penyaluran, Transparansi	5
2	Ampelu Mudo	-	-
3	Jebak	Keterlambatan Penyaluran, Merasa Tidak Tepat Sasaran, akses jalan yang buruk dan jauh	9
4	Pelayangan	Keterlambatan Penyaluran, Merasa Tidak Tepat Sasaran	7
5	Pematang Lima Suku	-	-

6	Pulau	Keterlambatan Penyaluran	3
7	Rambutan Masam	Merasa Tidak Tepat Sasaran, Transparansi	2
8	Rantau Kapas Mudo	Merasa Tidak Tepat Sasaran	1
9	Rantau Kapas Tuo	Merasa Tidak Tepat Sasaran	2
10	Suka Ramai	Keterlambatan Penyaluran	5
11	Sungai Pulai	Data yang Tidak Pas, Keterlambatan Penyaluran	5
12	Tanjung Marwo	Keterlambatan Penyaluran, Meras Tidak Tepat Sasaran	3

Sumber: Kasi Kesra Kecamatan Muara Tembesi

Dengan jumlah penerima terbanyak, tentu dalam proses penyalurannya lebih panjang ditambah adanya salah satu dusun yang letaknya jauh dari kantor desa yakni dusun Senami. Akses jalan yang buruk menjadi kendala dalam proses penyaluran BLT-DD mulai dari pendataan awal sampai pada penyerahan bantuan. Sebagian besar masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi berada di desa tersebut. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Jebak untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran BLT-DD dalam membantu perekonomian masyarakat akibat *Covid-19*.

Untuk mengetahui fokus masalah pada penelitian ini agar penelitian yang akan dilakukan nantinya memiliki keunikan, perbedaan, dan merupakan penelitian yang baru serta penting untuk dilakukan. Oleh karenanya penulis dalam hal ini menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya memiliki keterkaitan tema yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Monika Widyaningrum, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di tahun 2020 dengan judul

“Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi *Covid-19*” studi kasus Desa Kapiteran.⁸ Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfokus pada fakta dilapangan, dengan kesimpulan bahwa peran Kepala Desa Kapiteran dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ditengah pandmi telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu meskipun masih terdapat kendala dalam penyalurannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus permasalahan dimana peneliti lebih fokus pada bagaimana implementasi dari program BLT-DD di Desa Jebak dan apa yang menjadi kendala terbesar dalam proses penyalurannya.

Kedua, penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat” penelitian ini ditulis oleh Heri Gunawan.⁹ Merupakan salah satu mahasiswa dari program studi ilmu kesejahteraan sosial, fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara pada tahun 2019. Fokus dalam penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penerima manfaat terhadap kesejahteraan keluarga miskin dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pelaksanaan Program BPNT Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dapat dikatakan

⁸ Monika Widyaningrum, *Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Tengah Pandemi Covid-19*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

⁹Heri Gunawan, *Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

berjalan efektif. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti jenis bantuan dan lingkup yang berbeda yakni Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan pada masa pandemi.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat Kajian Cepat Pada Daerah Di Indonesia” penelitian yang dilakukan oleh Ayu Diah Amalia Mahasiswa Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati tahun 2018.¹⁰ Dalam Penelitiannya di temukan bahwa penelitian ini membahas tentang kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial terbesar di Indonesia, pemerintah Indonesia sekarang menargetkan angka kemiskinan akan turun pada tahun 2019 mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyak penduduk yang merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dengan alasan mereka telah menerima kartu program, namun bantuan belum juga bisa diambil semenjak kartu itu sampai kepada masyarakat. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti berfokus pada satu program bantuan yang bersumber dari dana desa yang di peruntukkan bagi masyarakat desa selama masa pandemi saat ini.

Bantuan langsung tunai dana desa bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi di setiap desa. Oleh karena itu implementasinya harus optimal agar dapat mencapai tujuan tersebut bukan hanya tersalurkan namun program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak pandemi. Desa Jebak sebagai salah satu desa penyalur BLT-DD dan

¹⁰Ayu Diah Amalia, *Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat Kajian Cepat Pada Daerah Di Indonesia*, Program Studi Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

menjadi penerima manfaat terbanyak sekaligus memiliki jumlah pengaduan terbanyak di Kecamatan Muara Tembesi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jebak pada masa pandemi?
- 1.2.2 Apa yang menjadi hambatan terbesar dari empat indikator implementasi menurut Edwar III dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa jebak pada masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jebak pada masa pandemi.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui apa yang menjadi hambatan terbesar dari empat indikator implementasi menurut Edwar III dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa jebak pada masa pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak *Covid-19* di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Akibat pandemi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi penulisan selanjutnya dan juga sebagai salah satu sumber data bagi pihak pemerintah serta evaluasi untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, agar bisa menjadi masukan untuk kedepannya.

1.5 Landasan Teori

Teori menjadi wadah bagi penulis dalam menganalisa masalah yang ditemukan di lapangan. Dengan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang suatu subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai, norma, peristiwa, prantara sosial, hingga perilaku manusia. Dalam sebuah penelitian landasan teori sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Teori menjadi payung peneliti untuk menganalisis masalah yang ditemukan di

lapangan. Sejumlah teori akan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik yang ada di lapangan. Berikut teori yang peneliti gunakan :

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terencana, di susun dengan matang dan terperinci. Menurut Lester dan Stewart dalam buku Kebijakan Publik Teori dan Proses memandang bahwa implementasi kebijakan dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penentuan undang-undang dimana berbagai *actor*, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹¹

Selain pengertian diatas, Solahuddin Kusumanegara dalam bukunya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dipahami secara rinci sebagai suatu proses, *output* dan *outcome*.¹² Implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan yang diterima dan di jalankan, sehingga nantinya sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya, dapat terlihat dampak implementasi yang telah berjalan. Seperti program BLT-DD ini, sejauh

¹¹Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Media Pressindo, 2008), hlm 144

¹² Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2010), hlm.98

mana program yang diberikan oleh pemerintah ini dapat membantu perekonomian dimasa pandemi saat ini.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan atau keputusan tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus di persiapkan dan direncanakan dengan baik.

Teori George C. Edward III yang berspektif *top-down* dengan istilah *Direct And Indirect Impact On Implementation*. Berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹³

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan, menuntut pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan di mana maksud serta tujuan kebijakan harus dikomunikasikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang harus mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi terjalin

¹³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.154

dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

1. Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering terjadi adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan berubah ditengah jalan.
 2. Kejelasan yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan karena pelaksana kebijakan membutuhkan kejelasan sehingga informassi dapat dijalankan dengan baik hingga mencapai tujuan yang di harapkan.
 3. Konsistensi yaitu perintah yang di berikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten karena jika perintah yang diberikan sering beruba-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaannya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang terbatas, staf dengan keahlian serta kemampuan yang kurang akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
 2. Informasi, memiliki dua bentuk yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 3. Wewenang, yaitu otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 4. Fasilitas, baik fisik maupun pendukung berupa sarana dan prasarana adalah keterkaitan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
- c. Disposisi, karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Jika pelaksana memiliki karakter yang baik, maka pelaksana dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika pelaksana mempunyai sikap ataupun pandangan yang berbeda terhadap pengambilan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III adalah :

1. Efek disposisi yaitu sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil

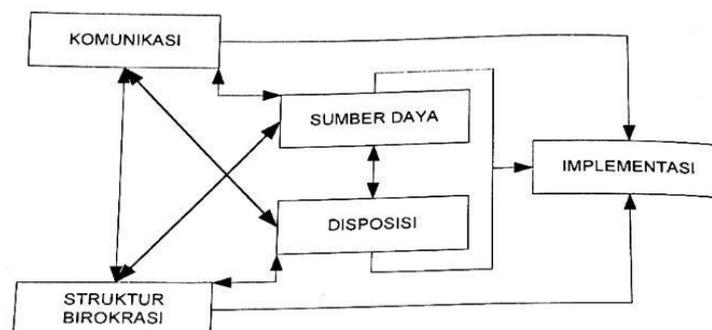
yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah di tetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2. Melakukan pengaturan birokrasi yaitu dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
 3. Intensif yaitu salah satu teknik yang di sarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi intensif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Berbagai aspek struktur organisasi adalah *Standar Oprating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi

yang terlalu panjang akan memperlemah pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit, dan membuat kegiatan menjadi tidak fleksibel.¹⁴

Menurut Edward III yang dapat menaikkan kinerja struktur birokrasi adalah :

1. Membuat *Standar Operating Procedure* (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrasi, atau birokrasi) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan fragmentasi, dengan tujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya fragmentasi pada struktur birokrasi, maka implementasinya akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.



**Gambar I. Model Implementasi Pendekatan
Direct And Indirect Impact On Implementation**

¹⁴ Ibid.,158

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Dengan adanya Penekanan pada proses ini, dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang di inginkan akan tercapai.

1.5.2 Konsep Bantuan Langsung Tunai

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa Tahun 2020. BLT-DD merupakan program yang di keluarkan oleh pemerintah karena dampak *Covid-19* yang mempengaruhi ekonomi. Selama masa pandemi ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021, pada pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-DD Dana Desa, dana yang bersumber dari anggaran dana desa.¹⁵

BLT-DD dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000, Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan

¹⁵Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2021

juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT-DD bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

a. Kriteria Calon Penerima BLT-DD

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial.

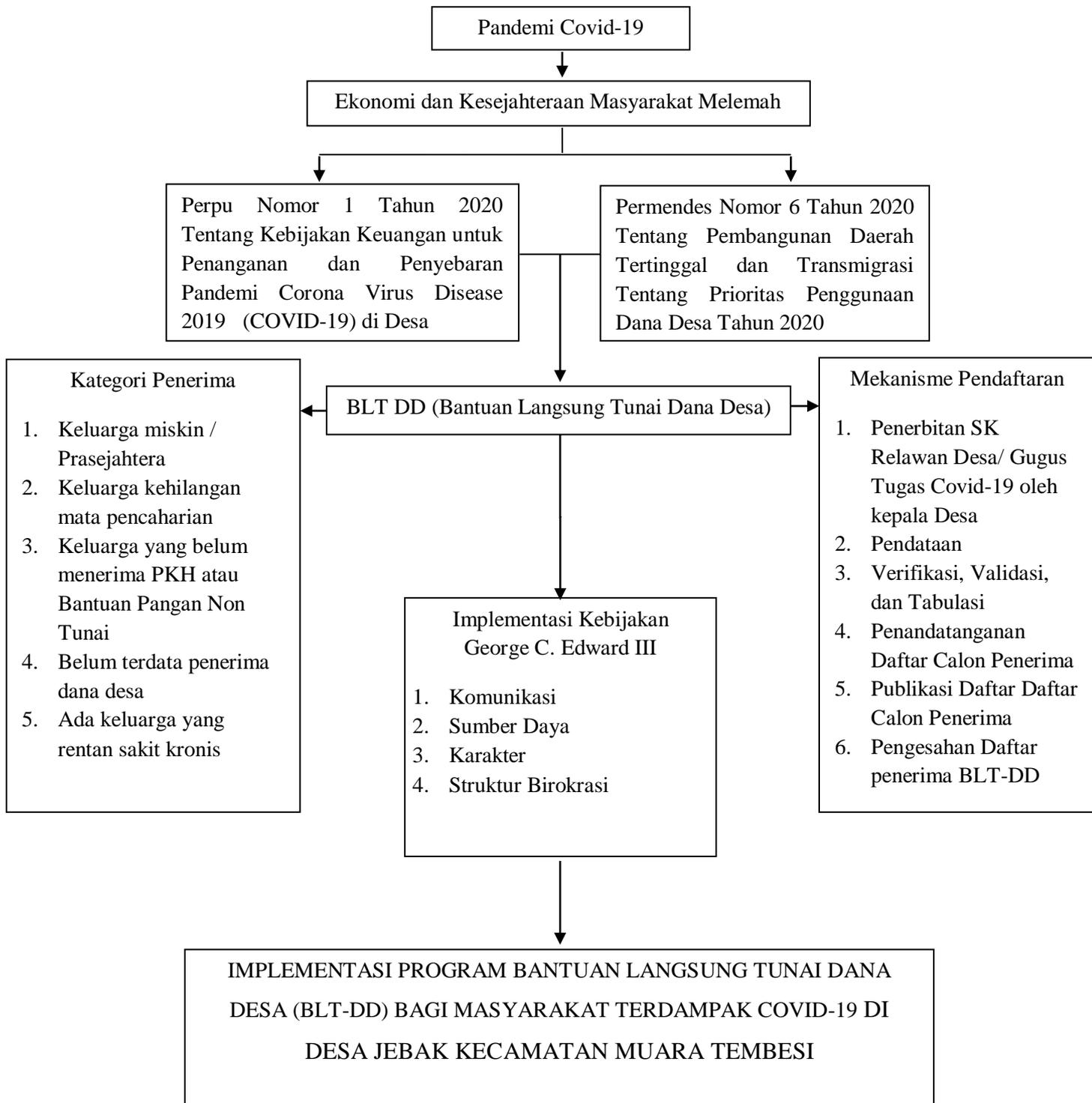
b. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

1. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (Tiga) bulan terhitung sejak april 2020
2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

- c. Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD :
1. Terbitkan SK, Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 sebagai tim pendata BLT-DD
 2. Pendataan, relawan melakukan pendataan di tingkat RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun
 3. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi, data calon penerima BLT-DD kemudian ditetapkan dalam Musdesus
 4. Penandatanganan Daftar, penandatanganan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD
 5. Publikasi Daftar, publikasi daftar calon penerima BLT-DD ditempat umum, website desa, SID, dll
 6. Pengesahan Daftar, pengesahan daftar calon penerima BLT-DD oleh Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat.
- d. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 2. Camat; dan Inpektorat Kabupaten/Kota
- e. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah kepala desa.¹⁶

¹⁶Buku Saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020. Halaman 7

1.6 Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis menjelaskan bagaimana dimasa pandemi yang saat ini melanda Indonesia yang membuat pengaruh besar terhadap beberapa elemen masyarakat baik itu berdampak pada sosial, budaya bahkan ekonomi. Pemerintah menaruh perhatian besar dan menjadikan kebutuhan masyarakat menjadi landasan utama dalam melaksanakan kebijakan berupa bantuan sosial tersebut, serta ditujukan guna meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah yang memang menurun selama masa *Covid-19*. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa dampak dari pandemi *Covid-19* telah dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat dalam mata pencaharian apapun seperti pedagang, pegawai, supir, nelayan dan sebagainya.

Pada dasarnya, secara keseluruhan adanya BLT-DD merupakan satu langkah efektif yang diambil oleh pihak pemerintah melalui peran pemerintah desa serta lembaga terkait dalam proses penyalurannya. Tujuan utama dari diadakannya BLT-DD adalah mendata ulang warga masyarakat di masa Pandemi *Covid-19* yang memang belum mendapat bantuan sama sekali (PKH, BPNT, Bansos). Anggaran yang dipakai adalah diambil dari Dana Desa, dengan kategory dan besaran yang berbeda-beda tentunya. Karena hal ini didasari oleh perbedaan perolehan anggaran pada tiap-tiap desa dalam 1 tahun, sehingga alokasi penyaluran pada tiap Desa menjadi berbeda. Singkatnya tidak semua warga masyarakat akan mendapat jatah bantuan, termasuk di beberapa desa pada Kecamatan Muara Tembesi sendiri.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu di perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada cara-cara keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penulisan itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁷

1.7.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif, dapat di katakan bahwa metode penelitian *policy* (metode penelitian kebijakan) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan menjadi efektif dan efisien. Data yang akan diperoleh dari penelitian kebijakan adalah data valid, reliabel, dan obyektif. Setelah data diolah akan menghasilkan beberapa rekomendasi tindakan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perumusan kebijakan. Selain itu, data hasil penelitian kebijakan berupa informasi tentang implementasi kebijakan, hasil kebijakan, dan evaluasi

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2019). Hlm.2.

kebijakan.¹⁸ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini model penyajiannya dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berdasarkan masalah yang telah ditemui dalam pra observasi dan wawancara, peneliti melihat bahwa dengan metode kualitatif data yang akan didapatkan akan lebih relevan dan bermakna, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih mendalam dan valid. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti disini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara ilmiah bagaimana implementasi Program BLT-Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak *Covid-19* di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Pada Masa Pandemi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Alasan peneliti meneliti di Desa Jebak adalah karena berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan bahwa Desa Jebak merupakan Penerima terbanyak BLT- DD sekaligus memiliki jumlah pengaduan lebih banyak dari desa lain yang ada di Kecamatan Muara Tembesi.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Bandung:Alfabeta, 2017) Hlm.23

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiyono menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.¹⁹ Fokus dalam penelitian ini yaitu peneliti berfokus pada bagaimana implementasi dari Program BLT-DD bagi masyarakat terdampak *Covid-19* dan apa saja kendala terbesar dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah hal penting yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

1.7.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Data primer yang

¹⁹Sugiono, op.cit hlm 209.

penulis maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan observasi dan wawancara.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang di kumpulkan oleh peneliti ini, hanya sebagai penunjang data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen pelaksanaan program BLT-DD, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.²⁰

Teknik penentuan informan ini adalah jenis data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan

²⁰Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 2017, Hlm. 16.

pertimbangan atau sudah di tentukan. Berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu bertambahnya informan yang di butuhkan sesuai kebutuhan penelitian di lapangan.²¹

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Camat Kecamatan Muara Tembesi
2. Ketua BPD Desa Jebak Kabupaten Batanghari
3. Kepala Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi
4. Sekretaris Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi
5. Ketua RT Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi
6. Kepala Dusun Desa Jebak
7. Masyarakat Penerima BLT-DD di Desa Jebak
8. Tokoh Masyarakat Desa Jebak

Beberapa informan dipilih berdasarkan pengetahuan terkait program BLT-DD yang akan diteliti, camat dan BPD sebagai pengawas dalam pelaksanaan program ini, kepala desa sebagai penanggung jawab, staf kantor desa jebak sebagai petuga dari pendataan hingga penyaluran program ini, ketua RT dan kepala dusun sebagai media pertama dalam pendataan masyarakat penerima BLT-DD, Masyarakat penerima BLT-DD sebagai sasaran penerima

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 218.

program bantuan ini, tokoh masyarakat sebagai perwakilan yang mengamati keadaan atau segala proses hingga penyaluran dari program BLT-DD ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data primer diantaranya:

1.7.6.1 Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini. Hal yang akan diteliti dengan metode ini adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan keadaan fisik kota pada saat penelitian. Metode ini dipergunakan karena masyarakat masih sulit dipahami hanya dengan satu kali kunjungan saja sehingga di butuhnya metode ini untuk memahami masalah hingga mendapatkan data yang benar-benar valid dan *realibel*.²² Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk menilai dan memahami kondisi di lapangan bahwa setiap kelompok yang tergabung dalam program BLT-DD ini apakah sudah sesuai dengan mekanisme serta apakah sudah memberikan *output* yang sesuai atau tidak. Observasi dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum menulis proposal penelitian dan setelah dibuatnya proposal penelitian.

Pada tahap sebelum penulisan proposal, peneliti melakukan penjelajahan umum. Tahap kedua yaitu dengan cara melakukan pencarian data melalui Badan terkait beserta informan. Selanjutnya peneliti akan

²²Amirudin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016).hlm.213

membandingkan data yang telah terkumpul dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

1.7.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewed*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) yang dilakukan antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang akan diteliti seperti dalam hal ini terkait Implementasi program BLT-Dana Desa di Desa Jebak Kec. Muara Tembesi Kab. Batang Hari.²³

1.7.6.3 Studi Pustaka

Studi pustaka atau dokumenter ini dilakukan di perpustakaan. Dengan cara membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumen-dokumen pemerintah terkait serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴

1.7.6.4 Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi,

²³Muri, Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:Kencana hlm.372.

²⁴Ibid, hlm.213

buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan *flashdisk* data tersimpan di website dan lain-lain.²⁵ Adapun data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seperti foto, laporan kegiatan, Dokumen pemerintah yang berkaitan dengan program BLT-DD yang telah dilakukan di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan melakukan penelusuran hingga pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, dan memilih yang penting serta *essensial* sesuai dengan aspek yang dielajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:

1.7.7.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini data-data hasil dari wawancara yang didapatkan mengenai

²⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), Hlm. 33.

keberhasilan sasaran dari program BLT-DD, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program BLT-DD tersebut. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

1.7.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *display* data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miled dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

1.7.7.3 *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang akan dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada temuan bukti-bukti yang kuat terhadap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Temuan yang di dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih samar atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

1.7.8 Keabsahan atau Triangulasi Data

Penelitian Kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara langsung, apalagi tanpa kontrol serta sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini menggunakan Triangulasi Data, triangulasi ini menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Kedua, peneliti menggunakan Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian. Selain itu yang menjadi indikator pendukung keabsahan data atau triangulasi penelitian disini yaitu peneliti itu sendiri yang merupakan instrumen utama dan juga bersifat independent, teori yang sifatnya tidak memihak, dan Camat Kecamatan Muara Tembesi yang merupakan pengawas dalam pelaksanaan program BLT-DD.

²⁶Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman. Op. Cit, Hlm. 18